

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.G. (2000). *Jalan Panjang Pengendalian Pencemaran di Indonesia*. Deputi menteri lingkungan hidup bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Jakarta.
- Asdak, C. (2004). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjadarda University Press. Yogyakarta.
- Aziz, I.J. (1994). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. editor : M. Djodiputro. Jakarta, LPE-UI.
- Badri, N.L. (2004). *Karakteristik tanah, vegetasi dan air kolong pasca tambang timah dan teknik rehabilitasi lahan untuk keperluan revegetasi (Studi kasus lahan pasca tambang timah Dabo Singkep)*. Tesis Sekolah Pascasarjana. IPB-Bogor.
- Darwo (2003). *Respon Pertumbuhan Khaya anthoteca Dx. dan Acacia crassica A. Cunn. Ex. Benth. Terhadap Penggunaan Endomikoriza, Pupuk Kompos dan Asam Humat pada Lahan Pasca penambangan Semen*. Tesis. IPB, Bogor.
- Dunn, N.W (2000). *Public Policy Analysis : An Introduction*. 2nd edition. Terjemahan. Wibawa, S. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Editor : Darwin, M. New Jersey : University of Pittsburgh.
- Iskandar, Sujadmiko, and R.S. Gautama. (2003). *Acid Mine Drainage Management in Indonesian Mines*. Paper presented at 7th Australian Workshop on AMD held in Darwin on June 21-24, 2011
- Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Batubara No 1820.K/30/MEM/2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang Serta Pelaksanaan Penempatan dan Pemberian Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang.
- Mulyono, S. (1996). *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Neneng L, Tanduh Y, dan D Saraswati. (2012). *Aplikasi Metode Reklamasi Terpadu untuk Memperbaiki Kondisi Fisik, Kimiawi, dan Biologis, Pada Lahan Pasca Penambangan Emas di Kalimantan Tengah*. Prosiding InSINas 2012 Hal. 81-85.

- Patria, A. (1999). *Analisis kebijakan pengembangan pariwisata pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Batubara Nomor 26 Tahun 2018 Tentang.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Saaty, TL. (1986). *Decision Making for Leaders, The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World*. Terjemahan. Setiono, L., dan K. Peniwati. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Suryantono dkk. (2003). *Good Mining Practice, "Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar"*, Studi Nusa, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Waddell, S. (2002). *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Sebuah Analisis Kesenjangan*. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia – Jerman (ProLH-GTZ).
- Wibowo, H., M. Djajadilaga, W. Pribadi, S.M. Nurfadilastuti, Harimurti, H. Nurdin dan I. Siregar. (2008). *Pedoman Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Zipper, E., J. Skousen and C. Jage. (2011). *Passive treatment of acid-mine drainage. Reclamation Guidelines for Surface Mined Land in Southwest Virginia. Virginia Cooperative Extension. Publication 460-133.*

LAMPIRAN

Lampiran 1

: Tabel 13.. Persentase Respon Kuesioner Pemda.

No	Parameter	Jumlah (%)					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman Fitoremediasi.	-	-	33,33	66,67	-	Penting
2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh.	-	-	33,33	66,67	-	Penting
3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	-	-	-	66,67	33,33	Penting
4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	-	-	-	16,67	83,33	Sangat Penting
5	Tingginya biaya reklamasi	-	-	16,67	83,33	-	Penting
6	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	-	16,67	66,67	16,67	-	Netral
7	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia.	-	-	50	50	-	Penting
8	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi.	-	16,67	50	-	33,33	Netral
9	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijaminan kepada Pemerintah.	-	-	50	16,67	33,33	Netral
10	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan Reklamasi.	-	16,67	83,33	-	-	Netral

11	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	-	16,6 7	33,33	16,67	33,33	Netral
12	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan.	16,6 7	33,3 3	16,67	-	33,33	Tidak Penting
13	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	-	-	16,67	33,33	50	Sangat Penting
14	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang.	-	-	33,33	66,67	-	Penting
15	Mendapatkan kerjasama dengan pihak lain.	-	16,6 7	33,33	50	-	Penting
16	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN	-	-	33,33	16,67	50	Sangat Penting
17	Penurunan kualitas lingkungan.	-	-	50	50	-	Penting
18	Terjadinya banjir dan tanah longsor.	-	33,3 3	16,67	50	-	Penting
19	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	-	16,6 7	66,67	16,67	-	Netral
20	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan Pertambangan	-	16,6 7	50	33,33	-	Netral

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Penting

2 = Tidak Penting

3 = Netral

4 = Penting

5 = Sangat Penting

Tabel 14.. Persentase Respon Kuesioner Perusahaan.

No	Parameter	Jumlah (%)					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman Fitoremediasi.	-	10	10	40	40	Sangat Penting
2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh.	-	10	30	40	20	Penting
3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	-	10	10	40	40	Sangat Penting
4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	-	-	10	60	30	Penting
5	Tingginya biaya reklamasi	-	20	30	30	20	Penting
6	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	-	20	20	40	20	Penting
7	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia.	-	10	10	60	20	Penting
8	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi.	-	20	30	20	30	Penting
9	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijaminan kepada Pemerintah.	-	70	30	-	-	Tidak Penting
10	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan Reklamasi.	50	40	-	-	10	Sangat Tidak Penting

11	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	-	10	40	40	10	Penting
12	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan.	-	40	30	30	-	Tidak Penting
13	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	-	-	-	30	70	Sangat Penting
14	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang.	-	-	-	50	50	Sangat Penting
15	Mendapatkan kerjasama dengan pihak lain.	-	10	50	30	10	Netral
16	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN	-	-	30	40	30	Penting
17	Penurunan kualitas lingkungan.	-	-	30	50	20	Penting
18	Terjadinya banjir dan tanah longsor.	-	10	70	-	20	Netral
19	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	-	-	40	50	10	Penting
20	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan Pertambangan	-	-	10	40	50	Sangat Penting

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Penting

2 = Tidak Penting

3 = Netral

4 = Penting

5 = Sangat Penting

Tabel 15. Persentase Respon Kuesioner Akademisi

No	Parameter	Jumlah (%)					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman Fitoremediasi.	-	-	-	-	100	Sangat Penting
2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh.	-	-	-	50	50	Sangat Penting
3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	-	-	-	50	50	Sangat Penting
4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	-	-	-	-	100	Sangat Penting
5	Tingginya biaya reklamasi	-	-	50	50	-	Penting
6	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	-	50	50	-	-	Netral
7	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia.	-	-	50	50	-	Penting
8	Tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi.	50	-	-	50	-	Penting
9	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijamin kepada Pemerintah.	-	-	-	100	-	Penting
10	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan Reklamasi.	-	50	50		-	Netral

11	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	50	-	-	50	-	Penting
12	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan.	-	-	50	50	-	
13	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	-	-	-		100	Sangat Penting
14	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang.	-	-	50	50	-	Penting
15	Mendapatkan 126erjasama dengan pihak lain.	-	-	100	-	-	Netral
16	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN	-	-	-	-	100	Sangat Penting
17	Penurunan kualitas lingkungan.	-	-	-	-	100	Sangat Penting
18	Terjadinya banjir dan tanah longsor.	-	50	50	-	-	Netral
19	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	-	-	50	50	-	Penting
20	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan Pertambangan	-	100	-	-	-	Tidak Penting

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Penting
 2 = Tidak Penting
 3 = Netral
 4 = Penting
 5 = Sangat Penting

Tabel 16. Persentase Respon Kuesioner Masyarakat

No	Parameter	Jumlah (%)					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman Fitoremediasi.	-	6,66	13,32	26,64	53,28	Sangat Penting
2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh.	-	6,66	13,32	43,29	36,63	Penting
3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	-	9,99	36,63	36,63	16,65	Penting
4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	-	9,99	19,98	39,96	26,64	Penting
5	Tingginya biaya reklamasi	6,66	19,98	39,96	26,64	6,66	Netral
6	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	-	23,31	46,62	29,97	-	Netral
7	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia.	-	9,99	23,31	39,96	26,64	Penting
8	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi.	23,31	9,99	33,3	29,97	3,33	Netral
9	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijamin kepada Pemerintah.	6,66	13,32	26,64	36,63	16,65	Penting
10	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan Reklamasi.	9,99	13,32	29,97	26,64	19,98	Netral
11	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	23,31	36,63	13,32	19,98	-	Tidak Penting
12	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan.	23,31	43,29	26,64	6,66	-	Tidak Penting

13	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	-	6,66	26,64	43,29	23,31	Penting
14	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang.	-	13,32	29,97	29,97	26,64	Penting
15	Mendapatkan 129erjasama dengan pihak lain.	-	16,65	29,97	26,64	26,64	Netral
16	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN	-	-	9,99	43,29	46,62	Sangat Penting
17	Penurunan kualitas lingkungan.	-	13,32	29,97	39,96	16,65	Penting
18	Terjadinya banjir dan tanah longsor.	26,64	36,63	29,97	6,66	-	Tidak Penting
19	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	3,33	29,97	26,64	23,31	16,65	Tidak Penting
20	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan Pertambangan	3,33	13,62	36,63	33,3	13,32	Netral

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Penting

2 = Tidak Penting

3 = Netral

4 = Penting

5 = Sangat Penting

Tabel 17.. Persentase Respon Kuesioner LSM

No	Parameter	Jumlah (%)					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman Fitoremediasi.	-	-	-	50	50	Sangat Penting
2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh.	-	50	-	50	-	Penting
3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	-	-	50	-	50	Netral
4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	-	-	-	-	100	Sangat Penting
5	Tingginya biaya reklamasi	-	50	-	-	50	Netral
6	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	-	-	50	50	-	Netral
7	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia.	-	-	100	-	-	Netral
8	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi.	-	50	50	-	-	Netral
9	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijamin kepada Pemerintah.	50	50		-	-	Tidak Penting

10	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan Reklamasi.	-	-	50	50	-	Penting
11	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	-	-	50	50	-	Netral
12	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan.	-	50	50	-	-	Netral
13	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	-	-	-	-	100	Sangat Penting
14	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang.	-	-	100	-	-	Netral
15	Mendapatkan 131erjasama dengan pihak lain.	-	-	-	-	100	Sangat Penting
16	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN	-	-	-	50	50	Penting
17	Penurunan kualitas lingkungan.	-	-	50	-	50	Penting
18	Terjadinya banjir dan tanah longsor.	50	-	-	50	-	Netral
19	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	-	50	50	-	-	Netral
20	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan Pertambangan	50	50	-	-	-	Tidak penting

Keterangan : 1 = Sangat Tidak Penting
2 = Tidak Penting
3 = Netral
4 = Penting
5 = Sangat Penting

Tabel 18.. Rekapitulasi Respon Stakeholder

No	Stakeholder	Uraian
1	Pemerintah	<p>Persentase tertinggi ada pada pemilihan Pentingnya dilakukan Kegiatan reklamasi lahan pasca tambang</p> <p>Berdasarkan matriks 1.1 dapat dilihat dari jumlah pilihan stakeholder pemerintah, dimana dari 20 pertanyaan terdapat 12 (60%) pertanyaan yang direspon oleh stakeholder memilih pilihan penting.</p>
2	Perusahaan	<p>Persentase terpinggi ada pada pemilihan Pentingnya dilakukan Kegiatan reklamasi lahan pasca tambang</p> <p>Berdasarkan matriks 1.2 dapat dilihat dari jumlah pilihan stakeholder pemerintah, dimana dari 20 pertanyaan terdapat 15 (75 %) pertanyaan yang direspon oleh stakeholder memilih pilihan penting.</p>
3	Akademisi	<p>Persentase terpinggi ada pada pemilihan Sangat Pentingnya dilakukan Kegiatan reklamasi lahan pasca tambang</p> <p>Berdasarkan matriks 1.2 dapat dilihat dari jumlah pilihan stakeholder pemerintah, dimana dari 20 pertanyaan terdapat 7 (75 %) pertanyaan yang direspon oleh stakeholder memilih pilihan sangat penting dan 7 pertanyaan yang direspon penting.</p>
4	Masyarakat	<p>Persentase terpinggi ada pada pemilihan Pentingnya dilakukan Kegiatan reklamasi lahan pasca tambang</p> <p>Berdasarkan matriks 1.2 dapat dilihat dari jumlah pilihan stakeholder pemerintah, dimana dari 20 pertanyaan terdapat</p>

		10 (50 %) pertanyaan yang direspon oleh stakeholder memilih pilihan penting .
5	LSM	<p>Persentase terpinggi ada pada pemilihan Netral dilakukan Kegiatan reklamasi lahan pasca tambang</p> <p>Berdasarkan matriks 1.2 dapat dilihat dari jumlah pilihan stakeholder pemerintah, dimana dari 20 pertanyaan terdapat 10 (50 %) pertanyaan yang direspon oleh stakeholder memilih pilihan Netral.</p>

Lampiran 3. SKOR RATING (SWOT)

STRATEGI INTERNAL		FAKTOR - FAKTOR STRATEGI INTERNAL	PEMDA					PERUSAHAAN										LP		MASYARAKAT																				LSM		JUMLAH	RATING													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
KEKUATAN (Strengths)	S1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman fitoremediasi	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	174	3,480	
	S2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh	3	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	2	1	4	2	3	4	2	4	4	4	2	1	2	4	4	4	4	3	3	3	156	3,120		
	S3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	4	3	2	1	2	3	4	4	3	4	3	4	5	4	2	2	2	2	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	1	1	4	4	3	3	150	3,000		
	S4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	2	2	1	2	2	1	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	163	3,260	
KELEMAHAN (Weakness)	W1	Tingginya biaya reklamasi	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	1	4	4	4	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3	2	1	4	4	4	2	2	3	3	130	2,600			
	W2	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	4	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	3	2	2	3	2	2	1	1	3	123	2,460				
	W3	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia	4	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	4	2	3	3	3	2	2	1	3	4	3	3	3	2	2	2	1	1	2	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	2	3	4	3	2	3	3	4	135	2,700			
	W4	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi	3	3	3	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	4	2	2	1	4	2	3	3	113	2,260			
	W5	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijamin kepada pemerintah	4	4	3	3	4	3	1	3	3	2	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	4	1	2	2	1	2	3	3	4	1	2	2	3	1	1	2	3	107	2,140				
	W6	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan reklamasi	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	2	4	4	4	2	2	4	2	2	4	2	4	3	3	2	2	3	3	126	2,520		
	W7	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	2	2	3	4	3	2	2	2	1	1	1	3	1	1	4	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	3	2	2	3	3	3	4	1	4	2	1	1	2	2	3	2	2	1	1	106	2,120			
	W8	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan	4	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	1	2	3	4	2	2	4	3	3	1	1	1	2	3	2	2	2	3	2	3	3	4	3	4	2	4	2	2	3	3	3	2	2	129	2,580			
		TOTAL																																																	1144	22,880				
STRATEGI EKSTERNAL		FAKTOR - FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	PEMDA					PERUSAHAAN										LP		MASYARAKAT																				LSM		JUMLAH	RATING													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
PELUANG (Opportunities)	O1	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	1	3	3	4	2	4	4	4	4	4	2	2	1	1	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	147	2,940
	O2	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang	3	4	2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	1	1	2	2	2	1	2	1	3	4	3	3	3	2	4	3	3	2	4	3	2	2	2	3	3	4	4	143	2,860				
	O3	Mendapatkan kerjasama dengan pihak lain	4	2	3	3	3	2	3	3	4	4	3	1	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	2	3	3	4	4	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	139	2,780			
	O4	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan	4	4	4	4	2	2	1	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	4	156	3,120	
ANCAMAN (Threats)	T1	Penurunan kualitas lingkungan	3	4	3	3	4	2	4	3	1	3	4	4	4	3	3	4	4	2	4	3	3	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	2	2	3	4	3	4	3	4	144	2,880				
	T2	Terjadinya banjir dan tanah longsor	2	3	2	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1	3	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3	2	2	1	2	2	3	1	1	3	1	3	2	2	86	1,720		
	T3	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	3	2	3	1	2	4	3	2	3	4	3	4	3	3	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	2	1	1	2	3	2	1	1	1	3	4	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	115	2,300	
	T4	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan pertambangan	2	1	2	3	3	4	3	1	1	2	1	2	2	2	3	2	4	4	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	4	3	3	4	3	3	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	124	2,480			
		TOTAL																																																	197	1,000				

Keterangan	1 = Kecil
	2 = Sedang
	3 = Besar
	4 = Sangat Besar

Lampiran 4. MATRIKS IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

STRATEGI INTERNAL		FAKTOR - FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT (b)	RATING (r)	SKOR (b x r)
KEKUATAN (Strengths)	S1	Keadaan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman fitoremediasi	0,146	3,48	0,509
	S2	Tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk remediasi lahan pasca tambang mudah diperoleh	0,136	3,12	0,424
	S3	Sumber daya manusia untuk menangani kegiatan reklamasi mudah didapatkan	0,130	3,00	0,390
	S4	Komitmen atau keseriusan perusahaan melaksanakan reklamasi tinggi	0,141	3,26	0,459
TOTAL			0,553		1,781
KELEMAHAN (Weakness)	W1	Tingginya biaya reklamasi	0,111	2,60	0,288
	W2	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik	0,107	2,46	0,263
	W3	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia	0,127	2,70	0,343
	W4	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi	0,102	2,26	0,231
	W5	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijaminan kepada pemerintah	0,108	2,14	0,232
	W6	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan reklamasi	0,099	2,52	0,251
	W7	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan	0,097	2,12	0,207
	W8	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan	0,084	2,58	0,216
TOTAL			0,555		1,357
Selisih Total Skor Kekuatan dan Kelemahan : S-W = X					0,42

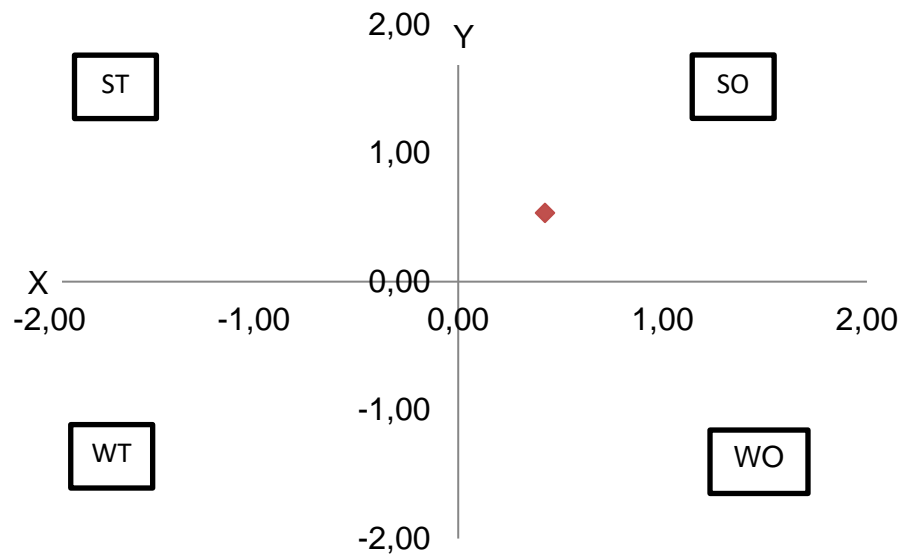
Lampiran 5. MATRIKS EFAS(External Factor Analysis Summary)

STRATEGI EKSTERNAL		FAKTOR - FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT (b)	RATING (r)	SKOR (b x r)
PELUANG (Oppurtunities)	O1	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian	0,144	2,94	0,424
	O2	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang	0,133	2,86	0,379
	O3	Mendapatkan kerjasama dengan pihak lain	0,124	2,78	0,345
	O4	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN	0,149	3,12	0,466
TOTAL			0,550		1,614
ANCAMAN (Treaths)	T1	Penurunan kualitas lingkungan	0,129	2,88	0,372
	T2	Terjadinya banjir dan tanah longsor	0,088	1,72	0,152
	T3	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah	0,113	2,30	0,260
	T4	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan pertambangan	0,119	2,48	0,296
TOTAL			0,450		1,080
Selisih Total Skor Peluang dan Ancaman: O-T = Y					0,53

Lampiran 6. Kuadran Strategi Hasil Analisis SWOT

X = 0.42

Y = 0.53



Lampiran 7. Tabel Data Kuesioner AHP

No	Nama	Instansi	Nilai Prioritas																					
			Aktor									Fokus						Arahan						
1	Ir. Andi Aziz	ESDM	3	5	-5	-3	-7	-9	-5	-5	-7	-3	1	-3	-3	-5	-7	1	-5	-3	5	-5	5	7
2	Hendra Putra, ST	ESDM	-5	-5	-7	-7	-3	-3	-3	1	-3	-3	-5	-3	1	1	1	1	-3	-3	5	-5	1	5
3	Sumarlin, ST	ESDM	-5	-3	-9	-3	-5	-3	-5	-7	-7	-3	1	-3	-3	1	1	1	1	-3	7	1	9	7
4	Rahmawati, S.Si	DLH	1	-5	-5	-7	-5	-5	-7	-5	-3	-3	-7	-7	-3	1	-3	-3	-7	-3	1	-5	1	5
5	Dra. Nurhayati	DLH	-3	-5	-5	-5	-7	-7	-7	-3	-3	-3	-7	-9	-5	-3	1	1	-7	-5	3	1	5	7
6	Amiruddin, S.Pd	DPRD	-3	-3	-3	-5	-5	-3	-7	1	-5	-5	1	-3	-3	1	5	1	1	1	5	1	3	3
7	Fadhil Fadly, ST	PT. BAI	-3	-3	3	-5	-3	-3	-3	-3	-3	3	-7	1	-5	3	-3	-3	1	1	-3	-3	3	3
8	Ir. Tri Angga B.P	PT. SBM	-5	-3	5	-5	7	-3	-3	-5	-3	3	-7	1	-5	5	-3	-5	3	1	-5	-3	5	5
9	Anas Ardiansyah, S.Si	PT. CGS	1	-3	-5	-5	7	5	-3	-5	-3	3	-3	-3	5	5	-7	-5	3	1	5	-3	3	5
10	Mubarak Hasanuddin, ST	PT. DUS	1	-5	3	-5	3	5	-3	-5	3	-3	-5	-3	5	5	7	5	3	-5	7	-3	1	5
11	Ir. Zainuddin T, ST	PT PJM	3	-5	-7	-5	3	-5	-3	-5	-3	5	-5	-7	-5	7	7	-3	5	-5	7	-3	-3	3
12	Muh. Imam DN, ST	PT WSM	3	-5	-7	-5	3	-5	-3	-5	-3	5	-5	-7	-5	7	7	-3	5	-5	7	-3	-3	3
13	Taufik Q. S.Si	PT KTR	1	-5	3	-5	3	5	-3	-5	5	5	-5	-7	-5	5	7	-3	5	-5	7	-3	1	3
14	Jusman, ST	PT MLP	7	-5	3	5	-3	5	-3	3	3	-3	-5	-7	-5	7	7	-5	5	-5	3	5	-5	-3
15	Risnawati A, ST	PT PBA	-3	-3	3	-5	-3	-3	-3	-3	-3	3	-7	1	-5	3	-3	-3	1	1	-3	-3	3	3
16	A. Aras Hasan, ST	PT MTI	-5	-5	7	-5	-3	3	5	5	-3	3	-7	1	-5	3	-3	-3	1	1	-7	-3	7	3
17	Ir. SURYADI, MT	LP	-7	-3	5	-5	7	-3	-3	-5	-3	3	-7	-5	-5	5	-3	-5	3	-3	-5	-7	9	-7
18	ABDULLAH S.Si. M.Si	LP	-5	3	5	7	5	3	5	-3	3	5	-5	5	-3	1	-3	-3	3	-3	3	1	3	3
19	Basri Rauf	Tokoh Msyrtk	-3	3	3	5	3	3	5	-3	-3	3	-3	1	-3	1	3	-3	-3	3	-3	3	3	-3
20	Awaluddin	Tokoh Msyrtk	7	5	-7	-7	-7	-7	1	-7	1	1	1	1	-7	-9	-9	1	9	1	9	1	1	1
21	Hasanuddin	Tokoh Msyrtk	9	-7	1	-5	-7	-5	1	7	-7	1	-5	-5	-7	-9	1	-7	1	1	9	-9	1	9
22	Jamaluddin, S.Ag	Tokoh Msyrtk	-9	-7	-7	1	-9	1	-9	1	1	1	-9	-7	-7	-9	-9	1	1	1	9	9	9	9
23	Muhammad Ridha	Tokoh Msyrtk	7	-7	1	7	-9	-7	1	-7	-7	1	-3	-7	-5	-9	-9	1	9	-9	9	-7	1	9
24	Mustakim	Tokoh Msyrtk	9	9	-9	-7	-7	-7	-9	-9	-9	7	-7	-3	-5	-9	-9	-7	1	-9	9	-9	9	9
25	Edi Suyitno	Tokoh Msyrtk	-7	-7	-9	-7	7	-9	-9	-9	1	1	1	7	-9	-9	-7	-9	-9	9	9	-9	9	9
26	Ahmad Nasir	Tokoh Msyrtk	9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	1	-9	-9	-9	-9	-9	-9	9	7	9	9	9	9	9
27	Sulaeman	Tokoh Msyrtk	-7	-7	-7	-7	-9	-9	-9	9	-7	-7	-3	-3	-7	-9	-9	-7	7	7	9	9	9	9
28	Abd Halim	Tokoh Msyrtk	9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	1	-5	-9	-7	-9	-9	-9	9	9	9	9	9	9
29	Hasbi	Tokoh Msyrtk	9	7	7	7	-9	-9	-9	-9	-9	1	1	7	-9	-9	-7	7	7	9	9	9	9	9
30	Abdullah	Tokoh Msyrtk	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	1	-3	-5	5	-9	-9	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
31	M. Aziz	Tokoh Msyrtk	-9	-7	-7	1	-7	-9	-9	-7	7	1	7	5	-7	-9	-9	7	9	9	9	-9	-9	-9
32	Jumadir	Tokoh Msyrtk	7	7	7	7	7	-7	1	-7	1	1	-3	-7	7	-9	-9	-9	9	-9	9	-9	9	9
33	Muhammad Arif	Tokoh Msyrtk	-7	-7	-7	-7	-7	-7	7	7	1	7	-3	-5	1	-9	-9	-9	9	9	9	-9	9	7
34	Amrullah Syarif	Tokoh Msyrtk	9	7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-5	1	1	1	-9	-9	-9	-7	-7	-7	9	-7	-7
35	Ardiansyah	Tokoh Msyrtk	7	5	-5	-7	-7	-7	-7	-9	-7	-7	-9	-9	7	-9	-9	1	-9	9	9	-9	-9	9
36	Muh. Risal	Tokoh Msyrtk	-7	-7	-7	-7	7	9	5	-7	-7	1	7	7	-9	-9	1	9	7	9	9	9	9	9
37	Nirwan Lamma	Tokoh Msyrtk	-9	-9	-9	-9	-7	-7	-7	1	1	-3	1	1	-9	-9	-9	1	7	7	1	9	9	9
38	Andi Irfan, S.pd	Tokoh Msyrtk	9	9	9	7	-7	-7	1	-7	1	-7	-9	-9	-9	-9	-9	9	9	9	9	9	9	9
39	Nurdin	Tokoh Msyrtk	5	7	7	7	7	-7	-7	-7	1	-7	-7	-7	1	-9	1	1	1	9	-9	-9	9	9
40	Basir	Tokoh Msyrtk	-7	5	5	5	-7	-7	1	-7	1	-3	-7	7	-9	-9	-7	7	5	7	7	9	1	1
41	Halim	Tokoh Msyrtk	-7	-7	5	-5	-7	1	-7	7	-7	-7	9	5	-7	-9	-7	7	1	9	-9	1	9	9
42	Andi Farid	Tokoh Msyrtk	-7	-7	-7	-7	-9	-9	-9	-9	-7	1	3	1	-7	-9	-9	9	7	9	7	9	9	9
43	Muliadi	Tokoh Msyrtk	7	-7	-7	-7	7	7	1	-7	-7	1	-5	-3	-5	-9	-9	9	-9	9	-7	9	9	9
44	Abdul Sabat	Tokoh Msyrtk	-9	-9	-9	-9	7	7	1	-9	-9	-7	1	1	1	-9	-9	9	1	-9	9	-9	9	9
45	Ansari	Tokoh Msyrtk	9	7	-9	-7	-9	-9	-9	-9	-9	1	-5	-5	-5	-9	-9	9	9	9	9	-9	9	9
46	Samsul Bahri	Tokoh Msyrtk	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	1	-7	-5	-7	-9	-9	9	9	9	9	9	9	9	9
47	Adam	Tokoh Msyrtk	7	7	7	-7	7	-9	-9	-9	-7	-3	-3	-7	-9	-9	-9	9	7	9	9	9	9	9
48	Sudirman Salomba	Tokoh Msyrtk	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	-7	3	1	-7	-9	-9	-9	9	9	9	9	9	9
49	Usman, S.Si	LSM	7	7	-7	-7	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-7	9	7	9	3	9	9	9
50	Yogi Pratama	LSM	3	-3	5	1	-3	1	1	5	-7	-7	-9	-9	-9	5	3	3	-9	-7	1	-3	3	3
																		-140	148	38	272	-44	220	278

Keterangan

- 1 = Kedua Elemen Sama Pentingnya
- 3 = Elemen Yang Satu Sedikit Lebih Penting Daripada Elemen Lainnya
- 5 = Elemen Yang Satu Lebih Penting Daripada Yang Lainnya
- 7 = Satu Elemen Jelas Lebih Mutlak Penting Daripada Elemen Lainnya
- 9 = Satu Elemen Mutlak Penting Daripada Elemen Lainnya.

Lampiran 8. Nilai Prioritas

a. Nilai Prioritas Aktor

No	Aktor / Stakeholders	Bobot	Prioritas
1	Perusahaan Pertambangan	0.299	1
2	Pemerintah Daerah (PEMDA)	0.242	2
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	0.185	3
4	Masyarakat	0.159	4
5	Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian (PT/LP)	0.115	5

Adapun penentuan Prioritas pertama yaitu 0.299 atau sama dengan 29,9 % selanjutnya Prioritas kedua yaitu Pemda dengan nilai bobot 0.242 atau sama dengan 24,2 %.

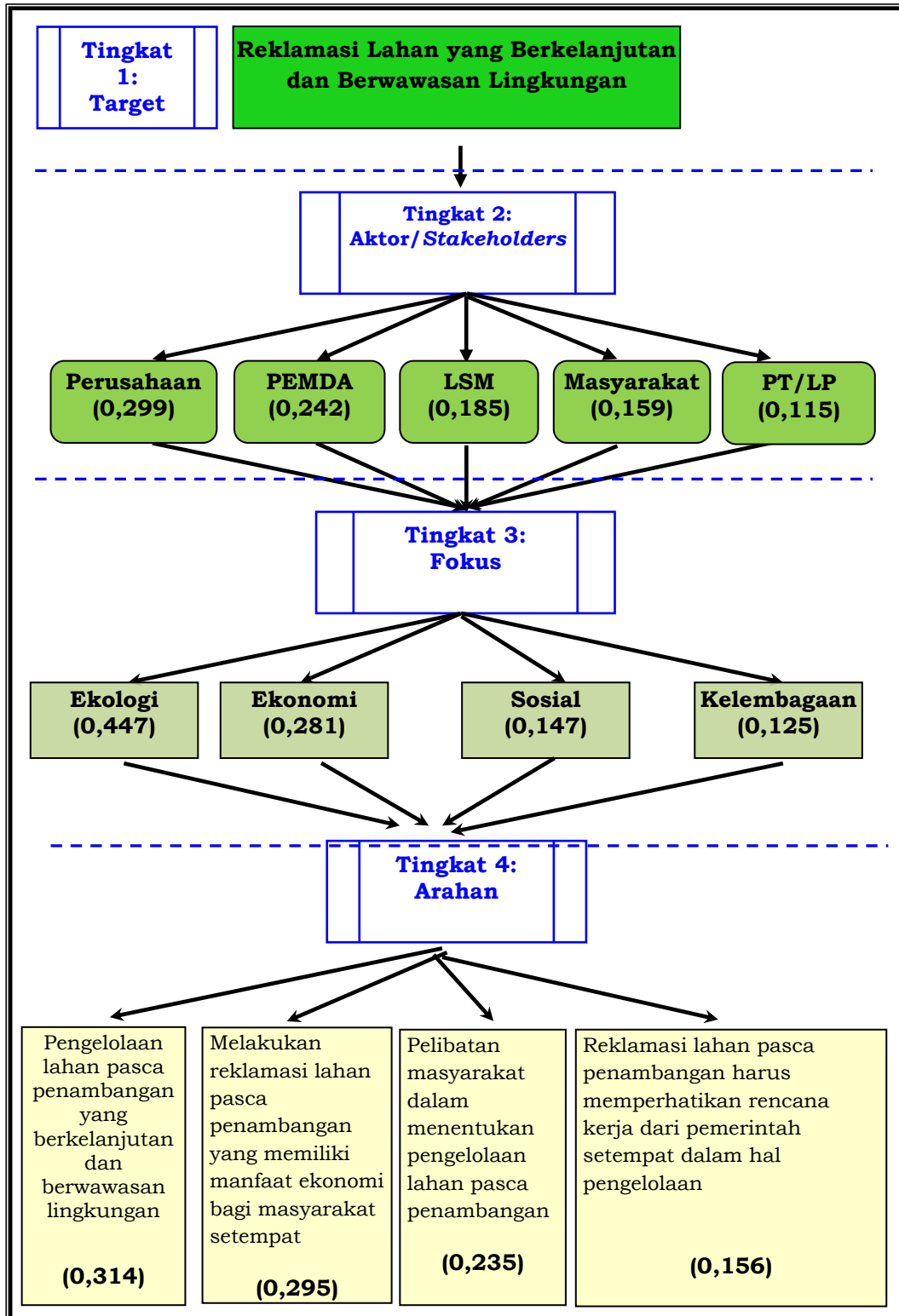
Nilai Prioritas Aspek

No	Stakeholders	Bobot	Prioritas
1.	Ekologi	0.447	1
2.	Ekonomi	0.281	2
3.	Sosial	0.147	3
4.	Kelembagaan	0.125	4

Nilai Prioritas Alternatif Kebijakan

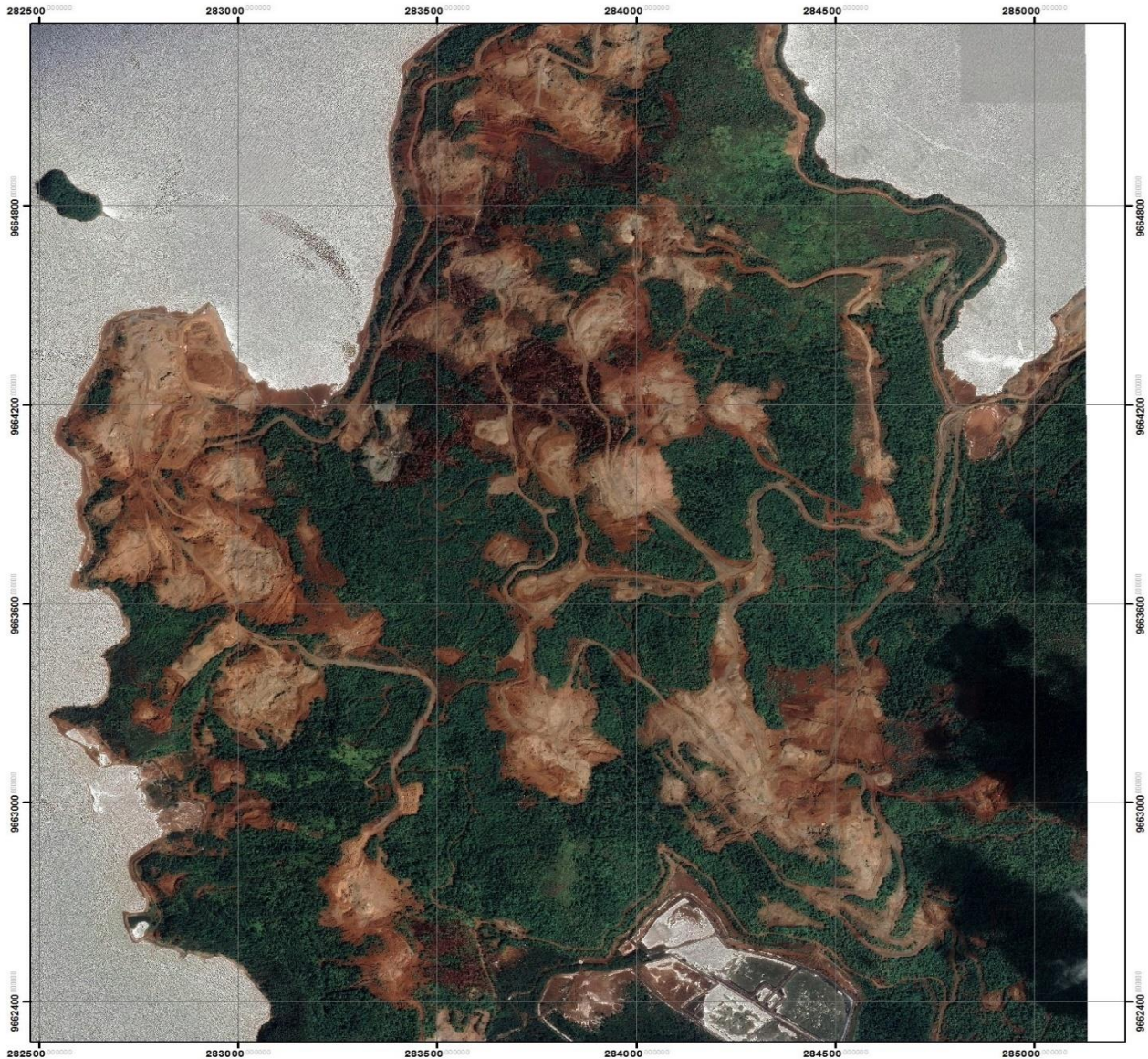
No	<i>Stakeholders</i>	Bobot	Prioritas
1.	Pengelolaan lahan pasca penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	0,314	1
2.	Melakukan reklamasi lahan pasca penambangan yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat	0,295	2
3.	Pelibatan masyarakat dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan	0,235	3
4.	Reklamasi lahan pasca penambangan harus memperhatikan rencana kerja dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat	0,156	4

Lampiran 9. Hasil Struktur Hierarki AHP



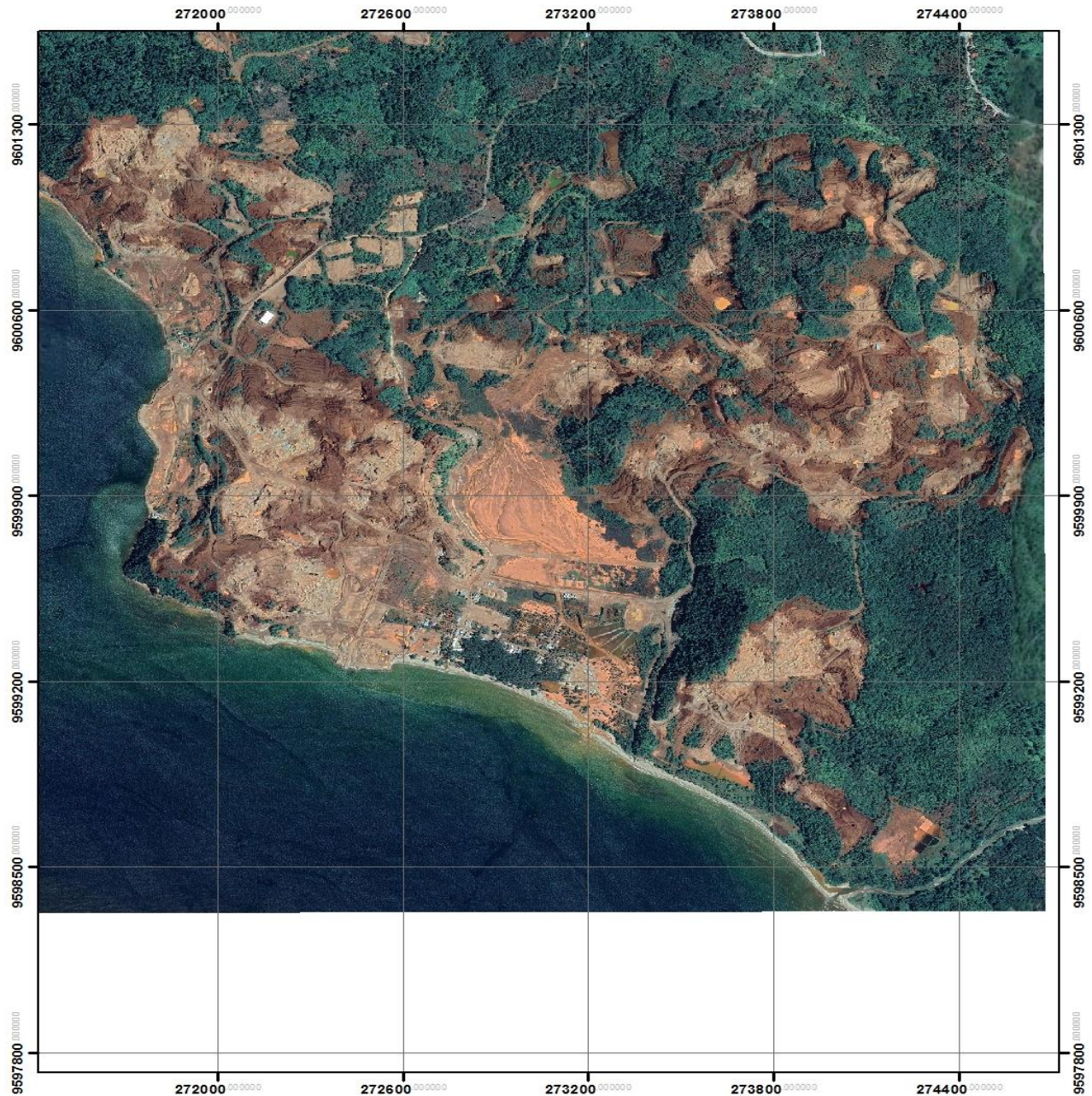
Lampiran 10. Peta Citrasatelit Kondisi Lahan Bekas Tambang

Kondisi Lahan Di Kecamatan Batuputih Dengan Luas Bukaannya 443 Ha



	<p>PETA BUKAAN TAMBANG DI DESA LELEWAWO KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA</p>  <p>0 0.25 0.5 Kilometers</p> <p>SKALA 1 : 10.000</p> <p>Sumber Peta : Citra Satelit (SAS Planet) Dibuat dengan Arcmap 10.3</p>	<p>KETERANGAN</p> <table border="0"><tr><td></td><td>Luas Bukaannya 443.51 Ha</td></tr><tr><td></td><td>Hutan</td></tr><tr><td></td><td>Tambak Garam</td></tr><tr><td></td><td>Pasir Putih dan Laut</td></tr></table>		Luas Bukaannya 443.51 Ha		Hutan		Tambak Garam		Pasir Putih dan Laut	 <p>Lokasi yang Dipetakan</p>
	Luas Bukaannya 443.51 Ha										
	Hutan										
	Tambak Garam										
	Pasir Putih dan Laut										
<p>BUHDI HARTONO P032181010</p>											

Kondisi Lahan di Kecamatan Totallang dengan Luas Bukan 495 Ha



**PETA BUKAAN TAMBANG
DI DE SA TOTALLANG KECAMATAN LA SUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

0 0.225 0.45
Kilometer

SKALA 1 : 10.000

Sumber Peta : Citra Satelit (SAS Planet)
Dibuat dengan Arcmap 10.3

KETERANGAN

	Luas Bukan 495.24 Ha
	Hutan
	Jalan
	La ut
	Sungai



Indeks Peta

Lampiran 11. Data Identitas Responden dan Kuesioner Untuk Analisis

SWOT dan AHP

No	Nama	Asal Instansi	Jabatan
1	Ir. Andi Aziz	Dinas ESDM Sulawesi Tenggara	Sekretaris ESDM
2	Hendra Putra, ST	Dinas ESDM Sulawesi Tenggara	ASN
3	Sumarlin. ST	Dinas ESDM Sulawesi Tenggara	ASN
4	Rahmawati, S.Si	Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara	ASN
5	Dra. Nurhayati	Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara	ASN
6	Amiruddin, S.Pd	DPRD Sulawesi Tenggara	Anggota
7	Fadhil Fadly, ST	PT Bitumen alam Indonesia	Anggota
8	Ir. Tri Angga B.P	PT Sinar Batumas Makmur	Anggota
9	Anas Ardiansyah, S.Si	PT Cahaya Gemilang Sentosa	Anggota
10	Mubarak Hasanuddin, ST	PT Daya Utama Sakti	Anggota
11	Ir. Zainuddin T, ST	PT Patrindo Jaya Makmur	Anggota
12	Muh. Imam DN, ST	PT Wanggudu Sumber Mineral	Anggota
13	Taufik Q, S.Si	PT Wanggudu Sumber Mineral	Anggota
14	Jusman, ST	PT Makmur Lestari Primatama	Anggota
15	Risnawati A, ST	PT Pertambangan Bumi anoa	Anggota
16	A. Aras Hasan, ST	PT Mega Tambang Indonesia	Anggota
17	Ir. SURYADI. MT	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peneliti
18	ABDULLAH S.Si. M.Si	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peneliti
19	Basri Rauf	Tokoh Masyarakat	
20	Awaluddin	Tokoh Masyarakat	
21	Hasanuddin	Tokoh Masyarakat	
22	Jamaluddin, S.Ag	Tokoh Masyarakat	
23	Muhammad Ridha	Tokoh Masyarakat	
24	Mustakim	Tokoh Masyarakat	
25	Edi Suyitno	Tokoh Masyarakat	

26	Ahmad Nasir	Tokoh Masyarakat	
27	Sulaeman	Tokoh Masyarakat	
28	Abd Halim	Tokoh Masyarakat	
29	Hasbi	Tokoh Masyarakat	
30	Abdullah	Tokoh Masyarakat	
31	M. Aziz	Tokoh Masyarakat	
32	Jumadir	Tokoh Masyarakat	
33	Muhammad Arif	Tokoh Masyarakat	
34	Amrullah Syarif	Tokoh Masyarakat	
35	Ardiansyah	Tokoh Masyarakat	
36	Muh. Risal	Tokoh Masyarakat	
37	Nirwan Lamma	Tokoh Masyarakat	
38	Andi Irfan, S.pd	Tokoh Masyarakat	
39	Nurdin	Tokoh Masyarakat	
40	Basir	Tokoh Masyarakat	
41	Halim	Tokoh Masyarakat	
42	Andi Farid	Tokoh Masyarakat	
43	Muliadi	Tokoh Masyarakat	
44	Abdul Sabat	Tokoh Masyarakat	
45	Ansari	Tokoh Masyarakat	
46	Samsul Bahri	Tokoh Masyarakat	
47	Adam	Tokoh Masyarakat	
48	Sudirman Salomba	Tokoh Masyarakat	
49	Usman, S.Si	LSM	Anggota
50	Yogi Pratama	LSM	Anggota

5	Tingginya biaya reklamasi																		
6	Tidak dimanfaatkannya dana jaminan reklamasi dengan baik																		
7	Perusahaan tidak menerapkan Good Mining Practice yaitu tidak melakukan kegiatan kegiatan eksplorasi secara detail sebelum melakukan penambangan sehingga banyak lahan yang dibuka dengan sia-sia																		
8	Tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan reklamasi																		
9	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi yang dijaminan kepada pemerintah																		
10	Perusahaan mengandalkan dana jaminan reklamasi untuk tidak melakukan reklamasi																		
11	Penambangan diluar lokasi izin usaha pertambangan																		
12	Maraknya penggunaan jasa kontraktor yang menyalahi aturan																		
II.	Faktor Eksternal																		
1	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan dan pertanian																		
2	Membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dalam kegiatan reklamasi tambang																		
3	Mendapatkan kerjasama dengan pihak lain																		
4	Dukungan pemerintah sangat memadai untuk kegiatan rehabilitasi pasca tambang terbukti dengan adanya penegasan tentang kewajiban reklamasi pada UU dan PERMEN																		
5	Penurunan kualitas lingkungan																		
6	Terjadinya banjir dan tanah longsor																		
7	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah																		
8	Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait lahan bukaan perusahaan pertambangan																		

SELAMAT MENJAWAB

Lampiran 13. Kuesioner Strategi Kebijakan Reklamasi Lahan Bekas
Tambang Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten
Kolaka Utara Untuk Analisis AHP

Kerangka Penetapan Strategi Berdasarkan AHP

Aktor Penentu Kebijakan:

1. Pemerintah Daerah (PEMDA)
2. Perusahaan
3. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (PT/LP)
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5. Masyarakat

Fokus Utama Kebijakan:

1. Ekologi
2. Ekonomi
3. Sosial
4. Kelembagaan

Arahan Kebijakan:

1. Pengelolaan lahan pasca penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Melakukan reklamasi lahan pasca penambangan yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat
3. Reklamasi lahan pasca penambangan harus memperhatikan rencana kerja dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat

4. Pelibatan masyarakat dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Instansi/Jabatan :

No. Telepon : -

Isilah perbandingan prioritas di bawah ini dengan memberikan tanda [√] pada angka yang sesuai dengan pendapat Anda, berdasarkan keterangan berikut ini :

1 = Kedua Elemen Sama Pentingnya

3 = Elemen Yang Satu Sedikit Lebih Penting Daripada Elemen Lainnya

5 = Elemen Yang Satu Lebih Penting Daripada Yang Lainnya

7 = Satu Elemen Jelas Lebih Mutlak Penting Daripada Elemen Lainnya

9 = Satu Elemen Mutlak Penting Daripada Elemen Lainnya

PERBANDINGAN PRIORITAS PADA AKTOR

Atribut pertama	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Atribut kedua
Pemerintah Daerah (PEMDA)										Perusahaan
Pemerintah Daerah (PEMDA)										Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (PT/LP)
Pemerintah Daerah (PEMDA)										Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Pemerintah Daerah (PEMDA)										Masyarakat
Perusahaan										Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (PT/LP)

Perusahaan										Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Perusahaan										Masyarakat
Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (PT/LP)										Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian (PT/LP)										Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)										Masyarakat

PERBANDINGAN PRIORITAS PADA FOKUS UTAMA

Atribut pertama	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Atribut kedua
Ekologi										Ekonomi
Ekologi										Sosial
Ekologi										Kelembagaan
Ekonomi										Sosial
Ekonomi										Kelembagaan
Sosial										Kelembagaan

PERBANDINGAN PRIORITAS PADA ARAHAN

Atribut pertama	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Atribut kedua
Pengelolaan lahan pasca penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan										Melakukan reklamasi lahan pasca penambangan yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat
Pengelolaan lahan pasca penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan										Pelibatan masyarakat dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan
Pengelolaan lahan pasca penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan										Reklamasi lahan pasca penambangan harus memperhatikan rencana kerja dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat
Melakukan reklamasi lahan pasca penambangan yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat										Pelibatan masyarakat dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan
Melakukan reklamasi lahan pasca penambangan yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat										Reklamasi lahan pasca penambangan harus memperhatikan rencana kerja dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

											serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat
Pelibatan masyarakat dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan											Reklamasi lahan pasca penambangan harus memperhatikan rencana kerja dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat

SELAMAT MENJAWAB